



STRATEGI PENDAMPINGAN DAN ADAPTASI SISTEM CORETAX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI 15 WILAYAH KECAMATAN SUNGAI LILIN

Katri Gentari¹, Avissa Calista², Sri Agustina³, Heriyana⁴, Emelda⁵
Institut Rahmadiyah Sekayu^{1,2,3,4,5}
e-mail: gentarikatri2@gmail.com

Diterima: 23/6/2026; Direvisi: 5/7/2026; Diterbitkan: 2/10/2026

ABSTRAK

Implementasi Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari transformasi administrasi perpajakan digital menuntut kesiapan pengguna dalam menyesuaikan prosedur dan pengelolaan administrasi berbasis sistem terintegrasi. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Sungai Lilin menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman teknis, variasi kemampuan digital pengurus, dan kebutuhan pendampingan dalam menyelesaikan tahapan administrasi pada Coretax. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menerapkan strategi pendampingan untuk mempercepat adaptasi pengurus koperasi terhadap penggunaan Coretax DJP. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan *experiential learning* yang dipadukan dengan *mentoring* terstruktur melalui identifikasi kebutuhan mitra, sosialisasi dan praktik penggunaan sistem, pendampingan teknis implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh 15 koperasi mitra berhasil menyelesaikan tahapan administrasi yang ditargetkan, mulai dari penetapan dan registrasi *Person in Charge* (PIC), aktivasi dan verifikasi akun, hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Pendampingan berbasis praktik langsung juga mendukung peningkatan kemampuan pengurus dalam memahami alur administrasi dan mengoperasikan Coretax. Kegiatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi terhadap sistem perpajakan digital memerlukan pendampingan yang menghubungkan kebijakan, teknologi, dan kapasitas pengguna menuju kesiapan operasional yang lebih mandiri.

Kata Kunci: Coretax DJP, Pendampingan, Transformasi Digital

ABSTRACT

The implementation of the Directorate General of Taxes (DGT) Coretax system as part of the digital transformation of tax administration requires users to adapt to new procedures and integrated system-based administrative practices. Village and Urban Village Red and White Cooperatives in Sungai Lilin District faced several challenges, including limited technical understanding, varying levels of digital capability among cooperative administrators, and the need for intensive assistance in completing administrative procedures within Coretax. This community service program aimed to implement an assistance strategy to accelerate cooperative administrators' adaptation to the Coretax system. The program employed an *experiential learning* approach combined with structured *mentoring*, encompassing needs identification, system orientation and hands-on practice, technical implementation assistance, as well as monitoring and evaluation. The results showed that all 15 partner cooperatives successfully completed the targeted administrative procedures, including the appointment and registration of a *Person in Charge* (PIC), account activation and verification, and the issuance of Electronic Receipt Evidence (*Bukti Penerimaan Elektronik* [BPE]). The hands-on assistance



also supported improvements in administrators' ability to understand administrative procedures and operate the Coretax system. These findings indicate that successful adaptation to digital tax administration requires an assistance model that connects policy, technology, and user capacity to promote greater operational readiness and independence.

Keywords: *Coretax DGT, Assistance, Digital Transformation*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara organisasi menjalankan proses bisnis, mengelola informasi, dan memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, melainkan juga menuntut penyesuaian kapabilitas organisasi dan kompetensi sumber daya manusia agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Verhoef et al. (2021) menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan pada strategi, struktur organisasi, proses, dan penciptaan nilai melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, keberhasilan transformasi tidak cukup ditentukan oleh tersedianya sistem digital, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam memahami, menerima, dan mengintegrasikan teknologi ke dalam aktivitas organisasi. Pandangan tersebut diperkuat oleh Shen et al. (2022) yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi dan kapabilitas digital menjadi faktor penting yang mendukung kinerja transformasi digital.

Perubahan tersebut juga berlangsung dalam administrasi perpajakan Indonesia melalui penerapan *Core Tax Administration System* atau Coretax DJP. Sistem ini menjadi bagian dari pembaruan administrasi perpajakan yang mengarahkan berbagai proses layanan menuju pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi digital. Dalam kondisi ideal, digitalisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kemudahan pelayanan, efisiensi pengelolaan data, serta mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih tertib. Namun, penerapan sistem baru pada praktiknya tidak selalu berlangsung tanpa hambatan karena pengguna harus menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan prosedur administrasi yang sebelumnya telah mereka gunakan. Palar et al. (2024) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap digitalisasi administrasi perpajakan memiliki hubungan penting dengan kemampuan wajib pajak dalam merespons perubahan sistem perpajakan berbasis digital.

Kesenjangan antara tujuan digitalisasi dan kesiapan pengguna juga terlihat dalam berbagai kajian mengenai implementasi dan digitalisasi administrasi perpajakan. Palar et al. (2024) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap digitalisasi administrasi perpajakan berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam merespons perubahan sistem perpajakan berbasis digital. Korat dan Munandar (2025) memandang penerapan *Core Tax Administration System* sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan perpajakan. Sementara itu, Qonitah (2026) menempatkan implementasi Coretax dalam kaitannya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi administrasi perpajakan. Ketiga kajian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem digital, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dalam memahami prosedur, mengoperasikan layanan, dan menyesuaikan praktik administrasi dengan perubahan sistem. Oleh karena itu, persoalan implementasi Coretax tidak hanya terletak pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kemampuan pengguna menerjemahkan perubahan regulasi dan prosedur digital ke dalam praktik administrasi sehari-hari.



Aspek penerimaan dan kemampuan pengguna menjadi semakin penting ketika Coretax diterapkan pada organisasi yang memiliki tingkat literasi digital yang beragam, termasuk koperasi. Listyawati et al. (2026) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan sistem Coretax berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan literasi digital menjadi faktor yang turut memengaruhi hubungan tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem yang secara teknis telah tersedia belum tentu dapat menghasilkan manfaat optimal apabila pengguna masih menghadapi keterbatasan dalam memahami dan mengoperasikannya. Dalam konteks koperasi, Perdana dan Umamy (2025) juga menempatkan literasi digital sebagai aspek yang relevan dalam mendukung pengelolaan kewajiban perpajakan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kapabilitas pengguna agar transformasi digital tidak berhenti pada perubahan sistem, melainkan berkembang menjadi perubahan nyata dalam praktik administrasi organisasi.

Kebutuhan penguatan kapabilitas tersebut menjadi semakin relevan bagi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang harus beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan digital dalam waktu yang relatif singkat. Secara ideal, pengurus koperasi diharapkan mampu menjalankan administrasi melalui sistem digital secara mandiri dan menyesuaikan data kelembagaan dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, kemampuan setiap pengurus dalam menggunakan teknologi tidak selalu berada pada tingkat yang sama, sehingga proses adaptasi berpotensi menghadapi hambatan teknis maupun administratif. Nashoha dan Karima (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam manajemen koperasi membuka peluang bagi peningkatan efektivitas pengelolaan organisasi, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan beradaptasi. Sementara itu, Lubna (2025) memperlihatkan bahwa pendampingan digitalisasi administrasi pada koperasi dapat menjadi sarana untuk membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas melalui penerapan teknologi dalam proses administrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi pendampingan perlu dirancang tidak sekadar sebagai kegiatan penyampaian informasi, tetapi sebagai proses belajar yang memungkinkan mitra berhadapan langsung dengan persoalan yang mereka alami. Pendekatan berbasis pengalaman memberikan ruang bagi peserta untuk memahami sistem melalui praktik, mencoba prosedur, melakukan koreksi, dan menyelesaikan kendala secara langsung dalam konteks pekerjaan nyata. Yusof et al. (2022) menunjukkan bahwa *experiential learning* dapat mendukung pengembangan keterampilan melalui keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran yang berbasis pengalaman. Dalam konteks penguatan kompetensi digital, Sadikin et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang bersifat aplikatif dapat berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan digital peserta. Dengan demikian, kombinasi antara praktik langsung dan pendampingan terstruktur memiliki potensi untuk mempercepat proses adaptasi terhadap teknologi baru dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada sosialisasi.

Meskipun kajian mengenai transformasi digital, digitalisasi perpajakan, literasi digital, dan penerapan Coretax terus berkembang, masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana proses adaptasi pengguna dapat didukung melalui model pendampingan yang berorientasi langsung pada penyelesaian tahapan implementasi. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak membahas hubungan antara pemahaman digital, kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, transformasi digital, atau kepatuhan pengguna terhadap sistem perpajakan (Palar et al., 2024; Listyawati et al., 2026; Qonitah, 2026). Di sisi lain, penelitian mengenai koperasi juga lebih banyak menempatkan transformasi digital sebagai isu manajerial dan penguatan administrasi



organisasi secara umum (Nashoha & Karima, 2024; Lubna, 2025). Belum banyak kajian yang secara khusus memosisikan pendampingan berbasis *experiential learning* dan *mentoring* terstruktur sebagai mekanisme untuk menjembatani kesenjangan antara tuntutan implementasi Coretax dan kapabilitas digital pengurus koperasi. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya model pendampingan yang tidak hanya mengukur pemahaman peserta, tetapi juga mengarahkan proses belajar hingga pengguna mampu menyelesaikan tahapan administrasi digital secara nyata.

Atas dasar kesenjangan tersebut, kegiatan pengabdian ini menawarkan model pendampingan implementatif yang memadukan *experiential learning* dengan *mentoring* terstruktur bagi pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di 15 wilayah Kecamatan Sungai Lilin. Kebaruan kegiatan terletak pada orientasi pendampingan yang tidak berhenti pada sosialisasi atau peningkatan pengetahuan, melainkan mengarahkan mitra untuk menjalani dan menyelesaikan secara langsung tahapan implementasi Coretax, mulai dari penetapan dan registrasi *Person in Charge* (PIC), aktivasi akun, verifikasi data, pengelolaan administrasi, hingga pencapaian luaran administratif berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Model tersebut memosisikan pendampingan sebagai jembatan antara perubahan sistem digital dan kemampuan operasional pengguna, sehingga transformasi teknologi dapat diterjemahkan ke dalam praktik administrasi koperasi. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini bertujuan mengimplementasikan dan menganalisis strategi pendampingan adaptasi Coretax DJP melalui praktik langsung dan *mentoring* terstruktur guna memperkuat kapabilitas digital pengurus serta mendukung kesiapan administrasi perpajakan pada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di 15 wilayah Kecamatan Sungai Lilin.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang tersebar di 15 wilayah, terdiri atas 13 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 11–12 Mei. Sasaran kegiatan berjumlah 30 peserta, dengan masing-masing koperasi mengikutsertakan 2 orang pengurus, sehingga seluruh 15 koperasi mitra terwakili dalam kegiatan pendampingan. Peserta merupakan pengurus koperasi yang berperan dalam pengelolaan administrasi dan ditetapkan sebagai *Person in Charge* (PIC) atau pihak yang dipersiapkan untuk menjalankan administrasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dengan mengombinasikan praktik langsung dan *mentoring* terstruktur agar peserta terlibat secara aktif dalam setiap proses administrasi yang harus diselesaikan. Sebelum pendampingan kepada mitra dimulai, tim pengabdian memperoleh pembekalan teknis melalui kegiatan *On the Job Training* (OJT) bersama KPP Pratama Sekayu sebagai persiapan untuk memahami prosedur dan tahapan implementasi yang akan diterapkan dalam kegiatan.

Prosedur kegiatan dilaksanakan melalui lima tahapan yang saling berurutan, yaitu identifikasi kebutuhan, sosialisasi dan edukasi, pendampingan teknis, verifikasi serta penyesuaian administrasi, dan monitoring evaluasi. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi, dan wawancara dengan pengurus koperasi untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman awal, kesiapan dokumen, serta kendala yang dihadapi dalam penggunaan Coretax DJP. Tahap berikutnya dilakukan melalui penyampaian informasi, demonstrasi sistem, dan praktik langsung yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan registrasi PIC, aktivasi akun, pemeriksaan data, pengaturan akses, serta penyelesaian administrasi yang diperlukan dalam sistem. Pada setiap tahap, tim memberikan arahan dan

konsultasi secara langsung ketika peserta mengalami kendala sehingga proses pendampingan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan administratif masing-masing koperasi.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan instrumen observasi pelaksanaan, catatan pendampingan, hasil verifikasi administrasi, dan dokumentasi luaran yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Indikator keberhasilan mencakup jumlah koperasi yang berhasil menyelesaikan registrasi PIC, aktivasi akun Coretax, verifikasi dan penyesuaian data administrasi, penyelesaian tahapan administrasi dalam sistem, serta penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Data yang terkumpul direkap berdasarkan setiap indikator dan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan target kegiatan dengan realisasi yang dicapai oleh 15 koperasi mitra yang diwakili oleh 30 peserta. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan dokumentasi visual untuk menunjukkan proses pelaksanaan serta capaian kegiatan, sedangkan pemaknaan terhadap hasil dan keterkaitannya dengan teori maupun penelitian terdahulu disajikan pada bagian Pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan Pendampingan Implementasi Coretax DJP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang tersebar di 15 wilayah Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran kegiatan adalah pengurus koperasi yang ditetapkan atau dipersiapkan untuk menjalankan peran sebagai *Person in Charge* (PIC) dalam pelaksanaan administrasi perpajakan berbasis Coretax DJP. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap melalui identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pendampingan teknis, verifikasi administrasi, serta monitoring penyelesaian tahapan implementasi. Sebaran wilayah mitra yang menjadi sasaran kegiatan disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Sebaran Wilayah Mitra Pendampingan Coretax DJP

No.	Desa/Kelurahan	Sasaran Pendampingan
1	Sungai Lilin	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2	Sungai Lilin Jaya	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
3	Sri Gunung	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4	Sumber Rejeki	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
5	Linggo Sari	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
6	Mulyo Rejo	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
7	Sukadamai Baru	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
8	Cinta Damai	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
9	Berlian Makmur	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
10	Bumi Kencana	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
11	Mekar Jadi	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
12	Nusa Serasan	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
13	Pinang Banjar	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
14	Panca Tunggal	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
15	Bukit Jaya	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, kegiatan mencakup 15 koperasi yang berada pada wilayah desa dan kelurahan di Kecamatan Sungai Lilin. Seluruh mitra memperoleh

pendampingan dalam proses persiapan dan pelaksanaan administrasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP. Pendampingan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan administratif masing-masing mitra, terutama berkaitan dengan kesiapan data, penunjukan PIC, dan proses aktivasi akun. Cakupan mitra tersebut menjadi dasar pelaksanaan pendampingan secara bertahap hingga seluruh sasaran menyelesaikan tahapan yang telah ditetapkan.

Sebelum melakukan pendampingan kepada mitra, tim pengabdian memperoleh pembekalan teknis melalui kegiatan *On the Job Training* (OJT) yang berkaitan dengan prosedur penggunaan dan implementasi Coretax DJP. Kegiatan pembekalan tersebut menjadi tahap persiapan bagi tim untuk memahami alur administrasi yang akan didampingi pada masing-masing koperasi. Dokumentasi kegiatan *On the Job Training* (OJT) bersama pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu disajikan pada Gambar 1. Pembekalan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendampingan teknis kepada pengurus koperasi di 15 wilayah sasaran.



Gambar 1. *On the Job Training* (OJT) Coretax oleh KPP Pratama Sekayu kepada Tim Pendamping

Gambar 1 menunjukkan kegiatan pembekalan teknis yang diikuti oleh tim sebelum pelaksanaan pendampingan kepada mitra. Materi pembekalan mencakup pemahaman mengenai prosedur administrasi dan tahapan penggunaan sistem Coretax DJP yang relevan dengan kebutuhan koperasi. Setelah memperoleh pembekalan, tim melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian strategi pendampingan berdasarkan kondisi mitra. Tahap persiapan tersebut diikuti dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan secara langsung pada koperasi sasaran.

Tahapan Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan, mulai dari pemetaan kondisi awal hingga monitoring penyelesaian administrasi. Setiap tahap dirancang untuk membantu peserta menyelesaikan kebutuhan administrasi secara bertahap sesuai dengan prosedur penggunaan Coretax DJP. Kegiatan tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui demonstrasi, praktik langsung, konsultasi, dan pendampingan pada saat peserta menjalankan tahapan administrasi. Rangkaian tahapan dan luaran pada setiap proses pendampingan dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan dan Luaran Pendampingan Implementasi Coretax DJP

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran
Identifikasi kebutuhan	Observasi, diskusi, dan pemeriksaan kesiapan administrasi	Pemetaan kebutuhan dan kendala mitra
Sosialisasi dan edukasi	Penyampaian informasi dan demonstrasi penggunaan Coretax	Pemahaman awal mengenai alur layanan
Pendampingan teknis	Registrasi PIC, aktivasi akun, dan pengaturan akses	Akun dan akses Coretax
Verifikasi administrasi	Pemeriksaan dan penyesuaian data serta dokumen	Data administrasi yang telah diverifikasi
Monitoring penyelesaian	Pemeriksaan penyelesaian tahapan dan dokumen elektronik	Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Tabel 2 menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan secara berurutan mulai dari identifikasi kebutuhan hingga monitoring penyelesaian administrasi. Tahap identifikasi digunakan untuk mengetahui kondisi awal dan kebutuhan pendampingan pada masing-masing koperasi. Tahap berikutnya diarahkan pada penyampaian informasi dan praktik penggunaan sistem sebelum peserta menjalankan proses administrasi secara langsung. Pada tahap akhir, penyelesaian setiap proses diverifikasi melalui luaran administratif yang dihasilkan oleh masing-masing mitra.

Tahap pendampingan teknis dilakukan secara langsung bersama pengurus koperasi untuk membantu proses registrasi dan aktivasi akun Coretax. Peserta memperoleh arahan pada saat melakukan pengisian data, pemeriksaan informasi, dan penyelesaian prosedur yang diperlukan dalam sistem. Pendampingan juga mencakup konsultasi terhadap kendala yang muncul selama proses penggunaan layanan digital. Pelaksanaan registrasi dan aktivasi akun bersama mitra ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendampingan Registrasi dan Aktivasi Coretax pada KDMP dan KKMP

Gambar 2 memperlihatkan pelaksanaan pendampingan secara langsung pada tahap registrasi dan aktivasi Coretax DJP. Tim pendamping memberikan arahan kepada pengurus koperasi sesuai dengan kebutuhan administrasi yang dihadapi selama proses tersebut. Setiap peserta melakukan tahapan penggunaan sistem dengan pendampingan pada saat diperlukan. Setelah proses registrasi dan aktivasi dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan serta verifikasi data administrasi.

Verifikasi Data dan Penyelesaian Administrasi

Setelah akun dan akses sistem tersedia, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesesuaian data dan kelengkapan administrasi. Pada tahap ini, tim dan pengurus koperasi melakukan pengecekan terhadap informasi yang diperlukan dalam proses administrasi melalui Coretax DJP. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau data yang belum lengkap, dilakukan penyesuaian sesuai dengan dokumen yang tersedia dan prosedur yang berlaku. Proses pendampingan pada tahap verifikasi dan penyelesaian administrasi ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pendampingan Verifikasi Data dan Penyelesaian Administrasi Coretax

Sebagaimana terlihat pada Gambar 4, proses verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan data dan dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian administrasi. Pendampingan diberikan secara langsung pada saat peserta mengalami kendala dalam memahami tahapan atau menyesuaikan informasi yang diperlukan. Proses tersebut dilakukan hingga setiap tahapan administrasi dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan masing-masing koperasi. Hasil dari penyelesaian tahapan tersebut kemudian dicatat sebagai bagian dari capaian implementasi kegiatan.

Capaian Implementasi Coretax DJP

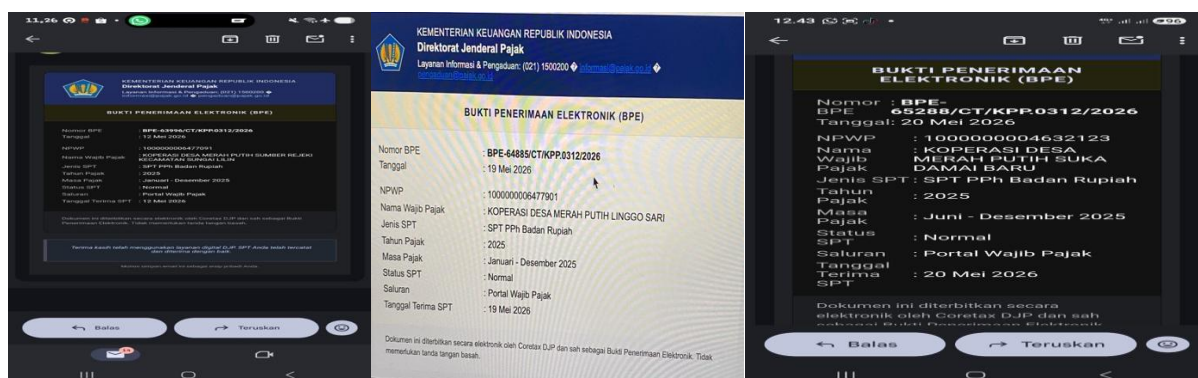
Capaian kegiatan diukur berdasarkan penyelesaian sejumlah tahapan administratif yang menjadi sasaran pendampingan. Indikator yang digunakan meliputi registrasi PIC, aktivasi akun Coretax, verifikasi data administrasi, penyelesaian integrasi administrasi perpajakan, dan penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Setiap indikator dibandingkan antara jumlah target mitra dan jumlah mitra yang berhasil menyelesaikan tahapan tersebut. Rekapitulasi capaian implementasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Implementasi Coretax DJP pada 15 Koperasi Mitra

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Registrasi <i>Person in Charge</i> (PIC)	15	15	100%
Aktivasi akun Coretax	15	15	100%
Verifikasi data administrasi	15	15	100%
Penyelesaian administrasi perpajakan dalam sistem	15	15	100%
Penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)	15	15	100%

Berdasarkan Tabel 3, seluruh indikator kegiatan mencapai jumlah realisasi yang sama dengan target yang telah ditetapkan. Sebanyak 15 koperasi menyelesaikan proses registrasi PIC dan aktivasi akun Coretax. Seluruh mitra juga menyelesaikan tahap verifikasi data dan administrasi yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan. Pada akhir proses pendampingan, sebanyak 15 koperasi memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai luaran administratif dari tahapan yang telah diselesaikan.

Penerbitan BPE digunakan dalam kegiatan ini sebagai bukti bahwa tahapan administrasi yang menjadi target pendampingan telah diselesaikan melalui sistem. Dokumen elektronik tersebut dikumpulkan sebagai bagian dari pencatatan capaian kegiatan pada masing-masing koperasi. Contoh luaran Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang dihasilkan melalui proses implementasi Coretax DJP ditampilkan pada Gambar 5. Penyajian gambar ini melengkapi data numerik pada Tabel 3 dengan menunjukkan bentuk luaran administratif yang diperoleh setelah penyelesaian proses.



Gambar 4. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai Luaran Implementasi Coretax

Gambar 4 menunjukkan bentuk luaran elektronik yang digunakan sebagai dokumentasi penyelesaian administrasi dalam kegiatan pendampingan. Informasi yang bersifat pribadi, nomor identitas, kode akses, atau data sensitif perlu disamarkan sebelum gambar dimasukkan ke dalam naskah publikasi. Dokumentasi tersebut disajikan sebagai bukti visual yang melengkapi capaian numerik pada Tabel 3. Dengan demikian, penyajian hasil menggunakan kombinasi tabel capaian dan dokumentasi luaran administratif.

Ringkasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan telah dilaksanakan pada 15 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang menjadi sasaran program di Kecamatan Sungai Lilin. Seluruh mitra mengikuti tahapan kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pendampingan teknis, verifikasi data, hingga penyelesaian administrasi melalui Coretax DJP. Capaian pelaksanaan dirangkum melalui tiga bentuk penyajian, yaitu sebaran mitra dan sasaran kegiatan pada Tabel 1, tahapan pendampingan pada Tabel 2, serta capaian implementasi pada Tabel 3. Sementara itu, Gambar 2 hingga Gambar 5 mendokumentasikan tahap persiapan tim, pelaksanaan registrasi dan aktivasi, proses verifikasi administrasi, serta luaran Bukti Penerimaan Elektronik.



Pembahasan

Keberhasilan seluruh Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dalam menyelesaikan tahapan registrasi *Person in Charge* (PIC), aktivasi akun, verifikasi data, penyelesaian administrasi, hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) menunjukkan bahwa implementasi sistem perpajakan digital memerlukan proses adaptasi yang tidak berhenti pada penyediaan teknologi. Dalam kegiatan ini, pendampingan secara bertahap digunakan untuk membantu mitra menjalankan prosedur administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing koperasi. Hasil tersebut sejalan dengan Daryatno et al. (2025) yang menempatkan implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Temuan yang sama juga diperkuat oleh Setiawan dan Asy'ari (2026) serta Wiraditha dan Tripriyono (2025), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan terintegrasi berkaitan dengan perubahan proses administrasi menuju layanan yang lebih efisien dan terdigitalisasi.

Capaian kegiatan juga memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan Coretax tidak hanya berkaitan dengan fungsi sistem, tetapi juga dengan kemampuan pengguna dalam beradaptasi terhadap perubahan prosedur kerja. Sebelum pendampingan dilakukan, sebagian pengurus koperasi masih menghadapi kebutuhan untuk memahami alur registrasi, aktivasi akun, pengelolaan data, dan penyelesaian administrasi berbasis sistem digital. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses transformasi digital yang menuntut kesiapan pengguna untuk mengembangkan keterampilan dan literasi yang sesuai dengan teknologi yang digunakan. Xicang et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran dalam hubungan antara transformasi digital dan adopsi teknologi, sedangkan Setiyaningsih dan Fahmi (2025) juga menempatkan literasi digital sebagai salah satu unsur penting dalam proses adopsi media digital pada kelompok masyarakat. Dalam konteks kegiatan ini, pendampingan berfungsi sebagai ruang pembelajaran yang membantu pengurus koperasi beralih dari keterbatasan pemahaman awal menuju kemampuan menjalankan tahapan administrasi yang menjadi sasaran kegiatan.

Pendekatan pembelajaran melalui praktik langsung menjadi salah satu karakteristik utama pelaksanaan pendampingan. Peserta tidak hanya menerima penjelasan mengenai prosedur Coretax, tetapi juga terlibat dalam registrasi PIC, aktivasi akun, pemeriksaan data, dan penyelesaian administrasi secara langsung. Pola tersebut sejalan dengan Nirmala et al. (2025) yang menerapkan *hands-on training* berbasis *experiential learning* untuk meningkatkan keterampilan digital peserta melalui keterlibatan langsung dalam penggunaan teknologi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa proses belajar yang berlangsung bersamaan dengan penyelesaian tugas administratif memungkinkan peserta memperoleh pengalaman yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, praktik langsung dalam pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai metode penyampaian materi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghubungkan pengetahuan prosedural dengan tindakan nyata dalam penggunaan sistem.

Selain praktik langsung, proses pendampingan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberian arahan dan bantuan ketika peserta menghadapi kendala pada setiap tahapan implementasi. Pola tersebut memiliki kesesuaian dengan temuan Hamonangan (2025) mengenai kontribusi *coaching* dan *mentoring* terhadap peningkatan kinerja dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran interaktif. Scandiffio et al. (2024) juga menunjukkan bahwa *mentoring* dan *coaching* dapat berperan dalam mendukung proses adopsi serta implementasi teknologi digital, khususnya ketika pengguna membutuhkan dukungan selama masa transisi penggunaan



teknologi. Dalam kegiatan ini, pendampingan tidak hanya diberikan pada tahap pengenalan sistem, tetapi berlangsung hingga peserta menyelesaikan prosedur administrasi yang menjadi target program. Karakteristik tersebut membedakan proses pendampingan dari kegiatan sosialisasi yang umumnya berakhir setelah penyampaian informasi dilakukan.

Hasil penerbitan BPE pada seluruh mitra menunjukkan bahwa proses pendampingan menghasilkan luaran administratif yang dapat digunakan untuk mencatat penyelesaian tahapan kegiatan. Capaian tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian Angela dan Munanda (2026) yang membahas penerapan sistem perpajakan terintegrasi sebagai bagian dari perubahan administrasi perpajakan di Indonesia. Dalam sistem terintegrasi, pengguna tidak hanya dituntut untuk memahami informasi mengenai kebijakan, tetapi juga harus mampu menjalankan prosedur administrasi melalui lingkungan digital yang digunakan. Daryatno et al. (2025) juga menunjukkan bahwa implementasi CTAS berkaitan dengan pelaksanaan proses perpajakan yang mencakup penghitungan, penyetoran, dan pelaporan secara lebih terstruktur. Oleh sebab itu, pencapaian BPE dalam kegiatan ini dapat diposisikan sebagai indikator operasional keberhasilan penyelesaian tahapan administrasi yang menjadi sasaran pendampingan, tanpa serta-merta menyimpulkan bahwa capaian tersebut telah mencerminkan peningkatan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Konteks organisasi mitra juga menjadi aspek penting dalam memahami hasil kegiatan ini karena koperasi memiliki tingkat kesiapan digital dan kapasitas administratif yang dapat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kristiahadi et al. (2025) menunjukkan bahwa pendampingan ekonomi digital pada pelaku usaha dapat dilakukan melalui pengenalan dan penggunaan platform digital yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Sementara itu, Priyanto et al. (2025) memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan dapat diarahkan pada pengembangan kemampuan praktis yang mendukung aktivitas organisasi atau usaha. Kesamaan dari kedua penelitian tersebut dengan kegiatan ini terletak pada pentingnya proses penguatan kapasitas yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan pengguna dalam menerapkan materi pada kebutuhan nyata. Dalam kasus koperasi mitra, kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pendampingan administratif yang berhubungan langsung dengan penggunaan Coretax DJP.

Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kegiatan ini memiliki karakteristik pada penggabungan antara penguatan kapasitas digital, praktik langsung, dan *mentoring* terstruktur dalam satu rangkaian implementasi administrasi perpajakan. Setiawan dan Asy'ari (2026), Wiraditha dan Tripriyono (2025), serta Angela dan Munanda (2026) memberikan perhatian pada implementasi dan implikasi sistem perpajakan terintegrasi pada tingkat administrasi yang lebih luas. Di sisi lain, Nirmala et al. (2025), Hamonangan (2025), dan Scandiffio et al. (2024) memberikan bukti mengenai relevansi pembelajaran berbasis pengalaman serta dukungan *mentoring* dan *coaching* dalam pengembangan keterampilan dan adopsi teknologi. Kegiatan ini mempertemukan dua kelompok pendekatan tersebut dalam konteks pendampingan Coretax pada organisasi ekonomi masyarakat, yaitu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Dengan demikian, kontribusi kegiatan tidak hanya terletak pada penyelesaian administrasi oleh mitra, tetapi juga pada penerapan pola pendampingan yang menghubungkan proses belajar langsung dengan penyelesaian luaran administratif yang dapat diverifikasi.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa adaptasi terhadap sistem administrasi digital dapat dilaksanakan melalui pendampingan yang disusun secara bertahap, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyelesaian prosedur yang menjadi target kegiatan.



Temuan ini mendukung gambaran yang disampaikan oleh Xicang et al. (2024) mengenai pentingnya kemampuan pengguna dalam proses adopsi teknologi, sekaligus memperkuat hasil Setiyaningsih dan Fahmi (2025) mengenai relevansi literasi digital dalam penerimaan teknologi oleh kelompok masyarakat. Keterlibatan peserta melalui praktik langsung sebagaimana juga ditunjukkan oleh Nirmala et al. (2025), serta keberadaan dukungan pendamping sebagaimana dibahas oleh Hamonangan (2025) dan Scandiffio et al. (2024), menjadi unsur yang saling melengkapi dalam proses kegiatan ini. Dengan capaian seluruh mitra yang berhasil menyelesaikan tahapan implementasi dan memperoleh BPE, model pendampingan dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pelaksanaan penguatan kapasitas bagi organisasi masyarakat yang menghadapi perubahan sistem administrasi berbasis digital. Namun, efektivitas jangka panjang model tersebut terhadap keberlanjutan penggunaan Coretax dan kemandirian administrasi mitra tetap memerlukan pemantauan pada periode berikutnya.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan implementasi Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di 15 wilayah Kecamatan Sungai Lilin menunjukkan bahwa percepatan adaptasi terhadap sistem administrasi perpajakan digital memerlukan lebih dari sekadar ketersediaan teknologi dan regulasi. Pendekatan *experiential learning* yang dipadukan dengan *mentoring* terstruktur memungkinkan pengurus koperasi memperoleh pengalaman langsung dalam menyelesaikan persoalan administratif sekaligus membangun kemampuan untuk mengoperasikan Coretax secara lebih mandiri. Capaian seluruh mitra dalam menyelesaikan tahapan implementasi hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik menunjukkan bahwa pendampingan dapat berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan digital dan kapasitas pengguna di tingkat organisasi masyarakat. Dengan demikian, makna utama kegiatan ini terletak pada pentingnya model pendampingan yang tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi mengarahkan proses belajar menuju kesiapan operasional dan penguatan kapabilitas digital mitra.

Secara praktis, model pendampingan ini dapat menjadi alternatif bagi perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga terkait dalam mendukung penerapan kebijakan berbasis digital pada koperasi maupun organisasi ekonomi masyarakat lainnya yang menghadapi kesenjangan literasi dan keterampilan teknologi. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat akar rumput perlu dibangun melalui keterlibatan aktif pengguna, praktik langsung, pendampingan berkelanjutan, serta penyelesaian persoalan yang sesuai dengan kebutuhan nyata mitra. Pengembangan program selanjutnya dapat diarahkan pada perluasan cakupan wilayah dan jenis organisasi, disertai evaluasi keberlanjutan untuk mengukur tingkat kemandirian pengguna setelah proses pendampingan berakhir. Selain itu, model tersebut dapat diintegrasikan dengan penguatan pengelolaan keuangan digital, pelaporan perpajakan elektronik, dan tata kelola koperasi berbasis teknologi informasi sehingga manfaat transformasi digital dapat berkembang dari kesiapan administratif menuju peningkatan kapasitas organisasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, C., & Munanda, A. (2026). Analisis penerapan sistem perpajakan terintegrasi di Indonesia: *Literature review*. *Prima Ekonomika*, 17(1), 150–159.
<https://jurnal.stieykp.ac.id/index.php/prima-ekonomika/article/view/344>



- Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetyo, J. (2025). Implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) untuk meningkatkan efisiensi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(2), 652–662. <https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252>
- Hamonangan, M. (2025). Kontribusi *coaching* dan *mentoring* terhadap kinerja guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran interaktif. *Jurnal Kepengawasan, Supervisi dan Manajerial (JKSM)*, 3(1), 9–17. <https://jurnalcentekia.id/index.php/jksm/article/view/611>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Kristiahadi, A., Purba, D. R., Samaloysa, G. C. C., Fevriera, S., & Pertiwi, A. T. (2025). Pendampingan ekonomi digital UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga dengan platform *online*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat–Teknologi Digital Indonesia*, 4(2), 118–127. <https://ejournal.akakom.ac.id/index.php/JPM/article/view/1898>
- Listyawati, I., Mulyati, S., Ukhriyawati, C. F., Kartika, E., Tanjung, R., & Salesti, J. (2026). Pengaruh kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan sistem CORETAX DJP terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 20(1), 174–183. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/measurement/article/view/9058>
- Lubna, S. (2025). Pendampingan digitalisasi administrasi berbasis komputer pada Koperasi Ar-Rohmah Wal Barokah sebagai upaya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. *Bale Pengabdian: Journal of Community Service (BPJCS)*, 1(2), 97–106. <https://doi.org/10.65798/bpjcs.v1i2.23>
- Nashoha, A., & Karima, S. (2024). Transformasi digital dalam manajemen koperasi: Peluang dan tantangan. *Journal Central Publisher*, 2(7), 2326–2332. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i7.485>
- Nirmala, P., Agusnaya, N., Bahtiar, T., & Fakhri, M. M. (2025). *Hands-on training Magicschool*: Peningkatan keterampilan pembelajaran digital bagi guru SMKS Handayani Gowa berbasis *experiential learning approach*. *Journal of Engineering Service and Innovation*, 35–43. <https://journal.unm.ac.id/index.php/JESI/article/view/8648>
- Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak dan digital transformasi terhadap kepatuhan pajak non-karyawan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(3), 1699–1716. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217>
- Perdana, S., & Umamy, E. (2025). Peran literasi digital dalam meningkatkan kepatuhan pajak koperasi pasca *spin-off*. *Jurnal Education and Development*, 13(3), 248–252. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/7473>
- Priyanto, R., Ramadhan, Y., & Hastuti, E. I. (2025). Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan manajemen bisnis dan *digital marketing*. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(2), 114–122. <https://doi.org/10.59025/r96byb74>
- Qonitah, I. (2026). Analisis implementasi *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911>
- Sadikin, I. S., Fatonah, K., Santosa, I., Fadli, M. R., Ulum, M. B., & Sari, Y. (2025). Pelatihan pembuatan bahan ajar adaptif berbasis *artificial intelligence* (AI) untuk meningkatkan



- kompetensi digital guru di SD Penggilingan 01 Jakarta. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 6(2), 377–394. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v6i2.5056>
- Scandiffio, J., Zhang, M., Karsan, I., Charow, R., Anderson, M., Salhia, M., & Wiljer, D. (2024). The role of *mentoring* and *coaching* of healthcare professionals for digital technology adoption and implementation: A *scoping review*. *Digital Health*, 10, 20552076241238075. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20552076241238075>
- Setiyaningsih, L. A., & Fahmi, M. H. (2025, December). Mengkaji ulang literasi digital dan adopsi media digital oleh kelompok wanita tani perkotaan di negara ASEAN. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 4, pp. 1165–1184). <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/7125>
- Setiawan, A. A., & Asy'ari, V. (2026). Analisis implementasi Coretax DJP dan implikasinya terhadap efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting, Auditing and Taxation*, 1(1). <https://journal.goufpublisher.com/index.php/aditax/article/view/18>
- Shen, L., Zhang, X., & Liu, H. (2022). Digital technology adoption, digital dynamic capability, and digital transformation performance of textile industry: Moderating role of digital innovation orientation. *Managerial and Decision Economics*, 43(6), 2038–2054. <https://doi.org/10.1002/mde.3507>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Wiraditha, G., & Tripriyono, A. (2025). Transformasi digital perpajakan melalui CTAS dan implikasinya terhadap transparansi serta efisiensi layanan di RRI Medan. *Economics and Digital Business Review*, 7(1). <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2929>
- Xicang, Z., Bilal, M., Jiying, W., Sohu, J. M., Akhtar, S., & Itzaz Ul Hassan, M. (2024). Unraveling the factors influencing digital transformation and technology adoption in high-tech firms: The moderating role of digital literacy. *SAGE Open*, 14(4), 21582440241300189. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440241300189>
- Yusof, Z. N., Murad, N., & Yusof, B. (2022). Digital skills and entrepreneurial education in Malaysia: Evidence from *experiential learning*. In *Theorising undergraduate entrepreneurship education: Reflections on the development of the entrepreneurial mindset* (pp. 311–332). Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-87865-8_17